

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERAKAN LITERASI SEKOLAH (GLS) DI MI/SD

Zumratun

STIT Sunan Giri Bima

zumratunntb@gmail.com

ABSTRACT

The school literacy movement is an educational policy that strives for students' literacy skills in mathematics, science, reading and writing. The school literacy movement is also considered as a movement that aims to make schools a place for learning (reading and writing) so that citizens can always be literate throughout life by involving the public. This school literacy movement must be encouraged because the Indonesian people's interest in reading and writing is still relatively minimal. This school literacy program is expected to be able to arouse interest in reading and writing from an early age. So, with this writing, the author invites schools and all levels of society, more specifically to student parents, to be able to support government policies regarding the school literacy movement. In writing this article, the author uses the method of writing literature studies with literature and the internet. GLS implementation at the MI/SD level is discussed according to the policies the government wants. Matters related to education policy and the school literacy movement are discussed systematically.

ABSTRAK

Gerakan literasi sekolah merupakan satu kebijakan pendidikan yang mengupayakan kemampuan literasi matematika, sains, membaca dan menulis peserta didik. Gerakan literasi sekolah juga dianggap sebagai sebuah gerakan yang bertujuan untuk menjadikan sekolah sebagai tempat untuk belajar (membaca dan menulis) agar warganya bisa selalu literat sepanjang hidup dengan melibatkan peran publik. Gerakan literasi sekolah ini wajib digalakkan karena minat membaca dan menulis masyarakat Indonesia masih tergolong minim. Program literasi sekolah ini diharapkan mampu membangkitkan minat membaca dan menulis sejak dini. Jadi, dengan adanya penulisan ini, penulis mengajak kepada sekolah dan seluruh lapisan masyarakat lebih khusus kepada wali murid agar dapat mendukung kebijakan pemerintah terkait gerakan literasi sekolah. Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode penulisan studi literatur dengan kepustakaan dan internet. Implementasi GLS di jenjang MI/SD dibahas sebagaimana kebijakan yang pemerintah inginkan. Hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan serta gerakan literasi sekolah dibahas secara sistematis.

Kata kunci: *Gerakan Literasi Sekolah, Kebijakan Pendidikan*

PENDAHULUAN

Sekolah merupakan wadah untuk mengembangkan potensi menjadi kompetensi. Potensi manusia sangat beragam, tidak hanya dibidang eksak melainkan dibidang seni, sastra dan bidang keilmuan lainnya. Pengembangan potensi dilakukan secara *continue*, agar kompetensi yang diharapkan bisa terlihat dan terorganisir secara sistematis.

Pengembang keilmuan melakukan inovasi pendidikan pada bidang strategi. Bidang ini beragam sehingga sukar untuk dikalsifikasikan, tetapi memiliki pola urutan yakni; desain, kesadaran dan perhatian, evaluasi, percobaan. Dalam penulisan artikel, penulis akan mengangkat tema Gerakan Literasi Sekolah (GLS) karena tema ini sedang *booming* di dunia pendidikan untuk meningkatkan kompetensi literasi siswa yang pada zaman ini berangsur-angsur turun. Gerakan literasi sekolah (GLS) ini pun merupakan hasil salah satu bidang inovasi pendidikan. Mengingat adanya tantangan dalam dunia pendidikan, khususnya bagi guru dalam menghadapi era globalisasi yang serba modern, sehingga memerlukan kreativitas dalam dunia pendidikan.

Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), dinyatakan bahwa ada tiga tantangan besar dalam bidang pendidikan di Indonesia, yaitu 1) mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai, 2) mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing dalam pasar kerja global, dan 3) sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman, memperhatikan kebutuhan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penulisan studi literatur dengan kepustakaan dan internet. Studi literatur atau Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Hampir semua penelitian memerlukan studi literatur atau pustaka. Walaupun orang sering membedakan antara riset kepustakaan (*library research*) dan riset lapangan (*field research*), keduanya tetap memerlukan penelusuran pustaka. Ada banyak manfaat dari sebuah studi literatur dalam proses membuat artikel penelitian. Salah satunya adalah memunculkan ide-ide terbaru dalam penelitian. Sebab tidak ada penelitian yang 100% baru, pasti akan ada irisan duplikasi dari penelitian sebelumnya. Dengan mempelajari studi literatur maka dapat mencari ide-ide penelitian, kebaruan penelitian, mempertajam ide, mencari metode yang cocok, atau bahkan untuk melakukan ATM (*Amati, Tiru, Modifikasi*).

KERANGKA TEORI

Gerakan literasi sekolah dikembangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2015 yaitu tentang penumbuhan budi pekerti dengan membiasakan siswa membaca buku non pelajaran sebelum waktu belajar dimulai. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan minat membaca siswa dan membiasakan siswa dengan buku serta memperbaiki kemampuan siswa dalam membaca agar menjadikan siswa yang berbudi pekerti luhur.

Permendikbud No. 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah menyebutkan bahwa hari sekolah digunakan bagi peserta didik untuk melaksanakan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan atau pendalaman kompetensi dasar atau indikator pada mata pelajaran/bidang sesuai dengan kurikulum. Gerakan literasi sekolah (GLS) juga mulai dijadikan bahan penelitian para mahasiswa dan ilmuwan pendidikan, dan dari beberapa peneliti mahasiswa tersebut terdapat alumnus UIN Sunan Kalijaga menjadi salah dua nya dari beberapa penelitian yang dilakukan.

Konsep Kebijakan Pendidikan

Kebijakan (*policy*) merupakan sekumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, kebijakan selalu mengandung keputusan, dimana keputusan kebijakan merupakan alternatif yang diambil mengenai cita adil, sedang kriteria yang dipakai mungkin rasionalitas, prioritas, atau kaidah konstitusi. Sementara kebijakan pendidikan itu sendiri diartikan sebagai kebijakan pemerintah untuk mengatur pendidikan di negaranya.

Pelaksanaan program suatu kebijakan bergantung pada bidang, perumus dan pelakunya, yang dalam kaitan ini kebijakan tersebut adalah bidang pendidikan, sedang perumus dan pelakunya adalah pembuat kebijakan (*legislature*, DPR dan MPR), Pemerintah (eksekutif, misalnya Presiden), badan administratif (misalnya Menteri Kabinet), dan peserta non-struktural (parpol, *interest groups*, dan tokoh perorangan), mengingat kebijakan pendidikan itu sendiri diartikan sebagai kebijakan pemerintah untuk mengatur pendidikan di negaranya. Departemen Agama dan Dinas Pendidikan sebagai lembaga negara menangani berbagai persoalan yang terkait dengan kebijakan pendidikan baik di lingkup Kemenag maupun di lingkup Diknas. Sejauh mana kebijakan pendidikan tersebut telah berlaku, bagaimana implikasinya di lapangan, serta perubahan sosial-politik yang melingkupinya.

Kebijakan pendidikan lahir dari ilmu praksis pendidikan sehingga kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Proses kebijakan tersebut dapat menggunakan model-model yang telah baku,

walaupun model-model tersebut mempunyai kelemahan dan kekurangan, namun dengan kombinasi berbagai model dapat dihasilkan proses kebijakan yang layak. Kebijakan pada bidang-bidang lainnya, merupakan proses kebijakan publik yang terdiri dari rumusan kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan, kinerja kebijakan pendidikan dan lingkungan kebijakan pendidikan.

Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kaitan pendidikan dengan komponen sosial yang lain. Oleh karena itu, seperti halnya kebijakan dalam bidang lain, sifat kontekstual dan interdisipliner ini merupakan ciri dari kebijakan pendidikan. Kebijakan merupakan usaha untuk menghasilkan dan mengolah informasi (yang relevan) dengan menggunakan ilmu sosial terapan. Untuk memecahkan masalah pendidikan dalam situasi politik tertentu ini dilakukan dengan metode *inquiry (methods of inquiry)* dan argumen ganda. Oleh karena itu, Kebijakan pendidikan adalah usaha dengan ciri yang disebutkan di atas yang diterapkan dalam bidang pendidikan. Kebijakan memiliki beberapa prinsip seperti berikut:

1. Kebijakan selalu mengandung keputusan, dimana keputusan kebijakan merupakan alternatif yang diambil mengenai cita idil; sedang kriteria yang dipakai mungkin rasionalitas, prioritas, atau kaidah konstitusi.
2. Kebijakan juga menekankan kepada tindakan, baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan.
3. Policy is not implemented; it is the statute or program that are implemented.
4. Pelaksanaan program suatu kebijakan bergantung pada bidang, perumus dan pelakunya, yang dalam kaitan ini kebijakan tersebut adalah bidang pendidikan sedang perumus dan pelakunya adalah: pembuat kebijakan (legislature, DPR dan MPR), pemerintah (eksekutif, misalnya Presiden), badan administratif (misalnya Menteri Kabinet), dan peserta non-struktural (parpol, interest groups, dan tokoh perorangan).

Ali Imron dalam bukunya Analisis Kebijakan Pendidikan menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan Negara. Carter V Good memberikan pengertian kebijakan pendidikan (educational policy) sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas system nilai dan beberapa penilaian atas factor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengopersikan pendidikan yang bersifat melembaga. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai. Kebijakan pendidikan sangat erat hubungannya dengan kebijakan yang ada dalam lingkup kebijakan publik, misalnya kebijakan ekonomi, politik, luar negeri, keagamaan dan lain-lain.

Konsekuensinya kebijakan pendidikan di Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Ketika ada perubahan kebijakan publik maka kebijakan pendidikan bisa berubah.

Pada prinsipnya, sebelumnya penerapan kebijakan, harus dianalisis terlebih dahulu. Tujuan dari analisis kebijakan karena kebijakan termasuk disiplin ilmu sosial terapan mengenai:

1. Nilai capaian dan tolok ukur pemecahan masalah
2. Fakta ketercapaian nilai
3. Tindakan pencapaian nilai dan pemecahan masalah

Disamping itu pula, proses penganalisaan kebijakan pendidikan harus melalui prosedur-prosesr kebijakan berikut:

1. Sebelum tindakan (*ex ante*): berupa prediksi dan rekomendasi.
2. Sesudah tindakan (*ex post*): berupa deskripsi dan evaluasi .

Kebijakan memiliki 4 tingkatan (*policy level*) meliputi:

1. Tingkat nasional (*national policy level*), misalnya Ketetapan MPR.
2. Tingkat umum (*general policy level*), misalnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden.
3. Tingkat khusus (*special policy level*), misalnya SK Menteri, dan Surat Edaran
4. Tingkat teknis (*technical policy level*), misalnya Keputusan Direktorat Jenderal atau pimpinan lembaga non-departemen ke bawah.

Selain itu, kebijakan juga memiliki ruang ruang lingkup, yakni;

1. Perumus kebijakan (*policy maker, legislative*)
2. Pelaksana kebijakan (*policy executor, executive*)
3. Produk kebijakan (*policy product*)

Model-Model Kebijakan Pendidikan

Beberapa masalah kebijakan tidak dapat dipahami dengan menggunakan metodologi kuantitatif. Karena sifatnya khusus dan unik seperti kegiatan pembelajaran, peningkatan kualitas mengajar guru, penataan ruang kelas, supervisi pengajaran, perencanaan pengajaran dan kegiatan lainnya di sekolah. Menurut William Dunn dapat digunakan berbagai tipe model kebijakan, yaitu model deskriptif, model normative, model formal, model simbolis, model procedural dan model sebagai pengganti dan persepsi. Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat menarik penjelasan bahwa model dalam kebijakan pendidikan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

Model deskriptif

Model deskriptif ini menjelaskan apakah fasilitas pembelajaran sudah memadai, kualifikasi guru memenuhi persyaratan, anggaran untuk pembelajaran dan sebagainya.

Dengan demikian model deskriptif adalah pendekatan positif yang diwujudkan dalam bentuk upaya ilmu pengetahuan menyajikan suatu “*state of the art*” atau keadaan apa adanya dari suatu gejala yang sedang diteliti dan perlu diketahui oleh para pemakai.

Model normatif

Diantara beberapa jenis model normatif yang digunakan dalam analisis kebijakan adalah nilai normatif yang membantu menentukan tingkat kapasitas pelayanan yang optimum, pengaturan volume dan waktu yang optimum serta keuntungan yang optimum pada investasi publik. Karena masalah-masalah keputusan normatif adalah mencari nilai-nilai variabel terkontrol (kebijakan) akan menghasilkan manfaat besar (nilai), sebagaimana terukur dalam variabel keluaran yang hendak diubah oleh para pembuat kebijakan. Tujuan model normatif bukan hanya menjelaskan atau memprediksi tetapi juga memperhatikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas (nilai), juga membantu memudahkan para pemakai hasil penelitian, menentukan atau memilih salah satu dari beberapa pilihan cara atau prosedur yang paling efisien dalam memecahkan suatu masalah.

Model verbal

Model verbal dalam kebijakan dideskripsikan dalam bahasa sehari-hari, bukannya bahasa logika simbolis dan matematika sebagai masalah substansi. Dalam menggunakan model verbal, analisis bersandar pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi. Penilaian nalar menghasilkan argumen kebijakan, bukan berbentuk nilai-nilai angka pasti.

Model simbolis

Model simbolis menggunakan simbol-simbol matematis untuk menerangkan hubungan antara variabel-variabel kunci yang dipercaya menciri suatu masalah. Prediksi atau solusi yang optimal dari suatu masalah kebijakan diperoleh dari model-model simbolis dengan meminjam dan menggunakan metode-metode matematika, statistik dan logika. Model-model simbolis dapat memperoleh keputusan, tetapi hanya jika premis-premis sebagai pijakan penyusunan model dibuat eksplisit dan jelas.

Model prosedural

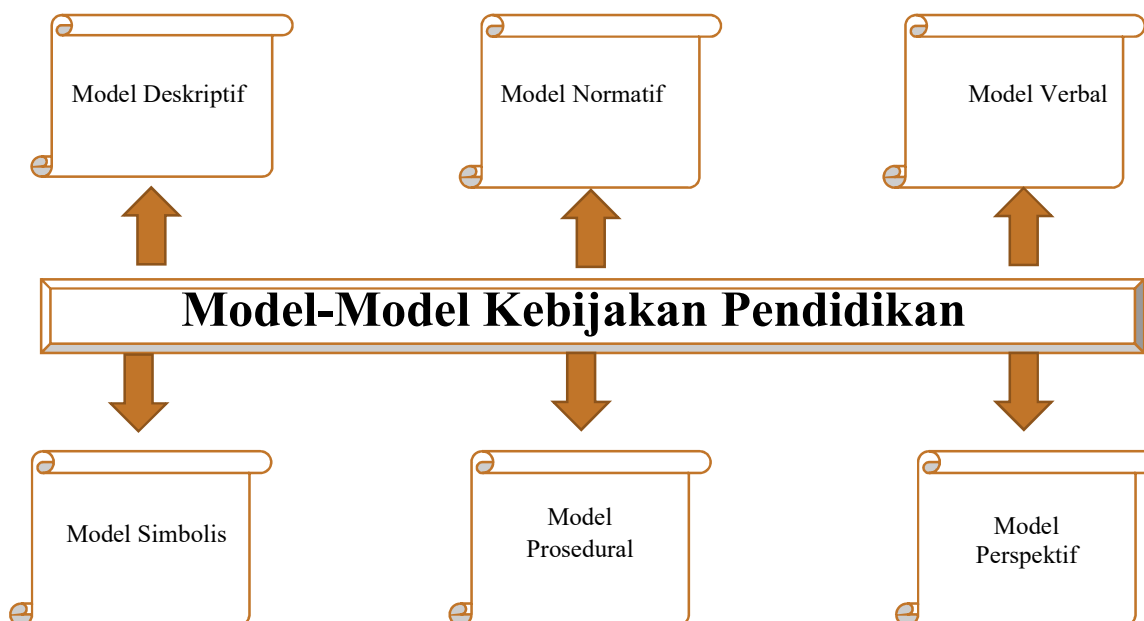
Model prosedural menampilkan hubungan yang dinamis antara variabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan. Model prosedural dicatat dengan memanfaatkan model ekspresi yang simbolis dalam penentuan kebijakan. Perbedaannya, simbolis menggunakan data aktual untuk memperkirakan hubungan antara variabel kebijakan dan data hasil. Sedangkan yang memungkinkan simulasi dan penelitian yang kreatif, kelemahannya sering mengalami kesulitan mencari data atau argumen yang dapat

memperkuat asumsi-asumsinya dan biaya model prosedural ini relatif tinggi dibanding model verbal dan simbolis.

Model sebagai pengganti dan perspektif

Model pengganti diasumsikan sebagai pengganti dari masalah-masalah substantive. Model pengganti mulai didasari atau tidak dari asumsi bahwa masalah formal adalah representasi yang sah dari masalah substantive, model perspektif didasarkan pada asumsi bahwa masalah formal tidak pernah sepenuhnya mewakili secara sah masalah substansi, sebaliknya model perspektif dipandang sebagai satu dari banyak cara lain yang dapat digunakan untuk merumuskan masalah substantive. Perbedaan antara model pengganti dan perspektif adalah penting dalam analisis kebijakan publik.

Keeanm model tersebut dapat digambarkan pada bagan berikut:



Proses Kebijakan

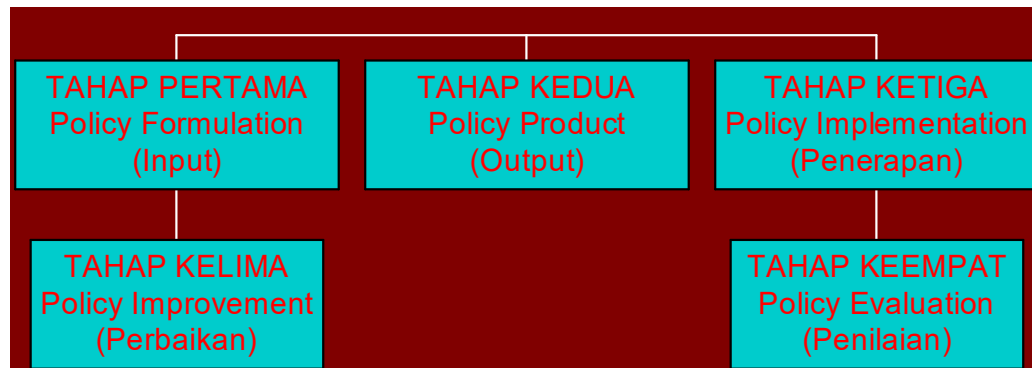
Ada beberapa pendapat mengenai proses kebijakan seperti Anderson menjelaskan bahwa proese kebijakan terdiri atas 5 (lima) tahapan yaitu, agenda kebijakan, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Sementara W.N. Dun, menyebutkan bahwa proses kebijakan terdiri dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Menurut Dye proses kebijakan sebagai suatu siklus yane meliputi identifikasi masalah, penetapan agenda, perumusan kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluassi kebijakan.

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat diketahui bahwa, ada sedikit perbedaan dari ketinganya, namun pada dasarnya semuanya dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun sebuah kebijakan.

Tahap Kebijakan

Dalam merumuskan sebuah kebijakan, ada tahap-tahap yang dijadikan sebagai dasar pembuatan kebijakan, diantaranya:

Siklus Kebijakan Pendidikan



Agenda perumusan kebijakan, terbagi atas

Proses kedua yang harus dilakukan dalam perumusan atau pembuatan sebuah kebijakan adalah agenda perumusan kebijakan, yaitu:

- a. Pembuatan agenda kebijakan (*agenda setting*)
 - 1) Langkah pertama yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan.
 - 2) Langkah kunci sebelum tahapan memasukkan suatu isu ke dalam agenda kebijakan pemerintah.
- b. Tingkat perhatian pemerintah terhadap isu kebijakan:
 - 1) Agenda sistemik, merupakan semua isu yang dipandang masyarakat sebagai hal yang patut memperoleh perhatian publik
 - 2) Agenda sistemik, merupakan serangkaian masalah yang secara tegas memerlukan pertimbangan secara aktif dan serius dan *policy maker*. Agenda ini lebih konkrit dan mempunyai khas.
- c. Pendekatan pembuatan agenda kebijakan:
 - 1) Pendekatan pluralistik
 - 2) Pendekatan elitis
 - 3) Pendekatan negara-pusat kekuasaan
 - 4) *Outside initiative model*
 - 5) *Inside access model*
 - 6) *Mobilization model*

d. Dari isu menjadi agenda jika mengandung:

- 1) Terdapat masalah sosial
- 2) Diterima kelompok
- 3) Bergabung dengan kelompok yang lain
- 4) Menjadi isu sosial
- 5) Sampai pada agenda publik
- 6) Tindakan pengartikulasian
- 7) Keputusan kebijakan atas beberapa masalah
- 8) Kelompok mulai menekan strategi isu terkait

Menurut Willian Dunn tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (Policy issue) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issue biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat diantara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut Wiliian Dunn, isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Ada beberapa kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik menurut Kimber, dkk, dianta:

- 1) Telah mencapai titik kritis tertentu jika diabaikan akan menjadi ancaman yang serius,
- 2) Telah menjadi tingkat partikularitas tertentu,
- 3) Berdampak dramatis jika tidak dilakukan pemunculan kebijakan oleh pejabat berwenang,
- 4) Menjangkau dampak yang amat luas,
- 5) Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat,

- 6) Menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya)

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi kemudian didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan.

c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

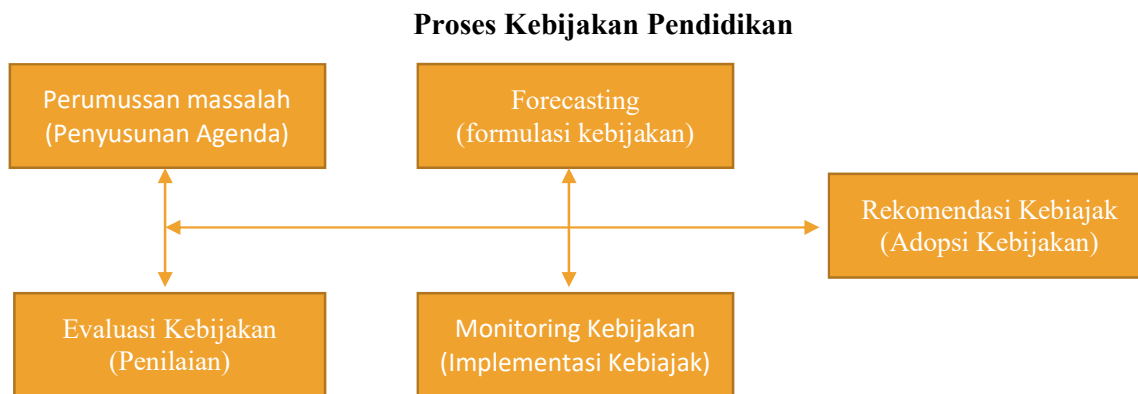
Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otoritas pada proses dasar pemerintah. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh keaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintah disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

d. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

e. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan sebagai suatu proses politik dan administratif. Dengan memanfaatkan diagram yang dikembangkan, jelas bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Ini merupakan syarat-syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik apapun.



Kebijakan Pendidikan yang Pernah Berlaku di Indonesia

1. Kebijakan Kolonial Belanda

- f. *Priesterraden* (1882): suatu badan khusus untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam.
- g. *Ordonansi Guru* (1905): mewajibkan setiap guru agama Islam meminta dan memperoleh izin tertulis dari bupati atau pejabat yang setingkat sebelum ia mengajar.
- h. *Guru Ordonantie* (1925): peraturan ini mewajibkan guru agama melapor pada pejabat terkait tentang maksud mereka mengajar, daftar murid, guru serta kurikulumnya secara tertulis dalam bahasa Belanda dalam formulir khusus.
- i. *Wilde School Ordonantie*, (1932): mengharuskan sekolah mendapat izin tertulis dengan berbagai syarat, antara lain: bahwa pemohon adalah orang yang dapat dipercayai oleh pemerintah, tidak melanggar *rust en order*, dan berasal dari lulusan sekolah pemerintah atau swasta bersubsidi.

2. Kebijakan Pendidikan Jepang

- a. Penutupan sekolah pada awal kedatangannya tahun 1942.
- b. Sensor buku pelajaran.
- c. Penyeragaman sekolah.
- d. Perintah seikerei bagi guru dan murid sebelum masuk kelas.
- e. Guru agama dimobilisasi untuk kepentingan perangnya.

3. Kebijakan Pendidikan Orde Lama (Orla)

- a. UUD 1945 Bab XIII pasal 31, menyatakan bahwa:
 - 1) Ayat 1: Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengajaran.
 - 2) Ayat 2: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

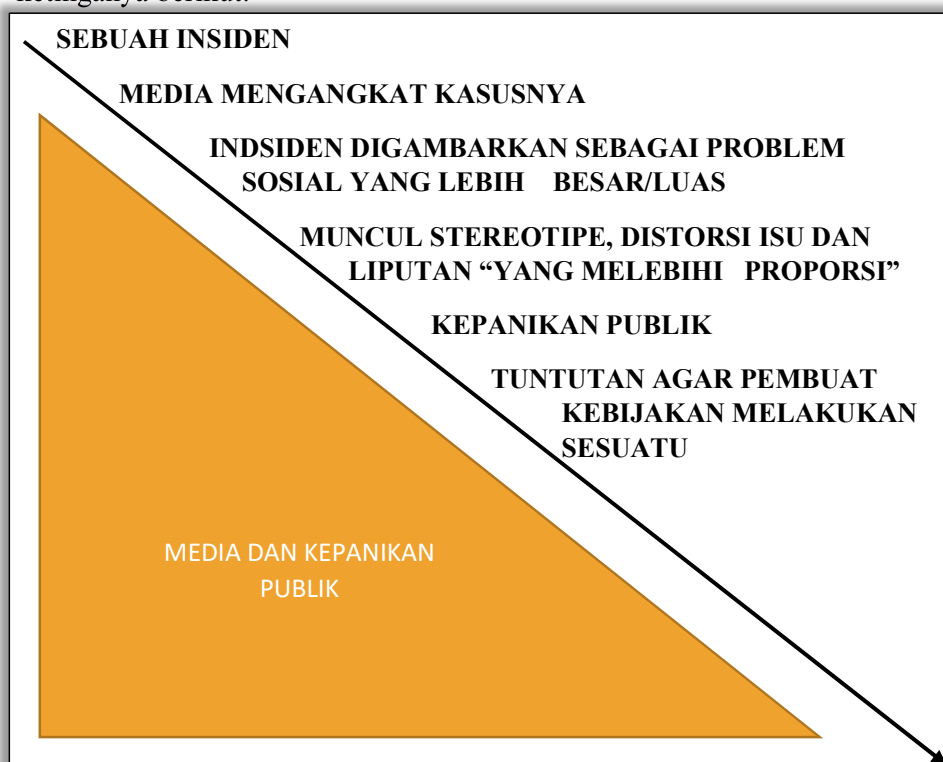
- b. UUPP No. 4 Tahun 1950.
- c. Kurikulum 1950, 1954, 1960, dan lain-lain.

4. Kebijakan pendidikan Orde Baru (Orba)

- a. Kurikulum 1968, 1975, 1994.
- b. SKB 3 Menteri Tahun 1975.
- c. UUSPN N0. 2 Tahun 1989.
- d. PP No. 38, 29, 30 Tahun 1990, dan lain-lain.

Hubungan Kebijakan (Pembuat kebijakan), Media dan Publik

Setiap kebijakan pasti pro dan kontranya, sehingga tidak jarang ketika sebuah kebijakan diberlakukan, maka ada dua reaksi yang akan terjadi dari publik, yakni ada yang menerima kebijakan itu dan juga yang tidak sesuai dengan pemberlakuan kebijakan tersebut. Ketika hal itu terjadi, maka hadirilah media yang mengangkat, membahas, dan menyoroti permasalahan tersebut. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan hubungan ketinganya berikut:



Gerakan Literasi Sekolah (GLS)

Secara tradisional, literasi dipandang sebagai kemampuan membaca dan menulis. Orang yang dapat dikatakan literat dalam pandangan ini adalah orang yang mampu membaca dan menulis atau bebas buta huruf. Pengertian literasi selanjutnya berkembang menjadi kemampuan membaca, menulis, berbicara dan menyimak. Sejalan dengan perjalanan waktu,

definisi literasi telah bergeser dari pengertian yang sempit menuju pengertian yang lebih luas mencakup berbagai bidang penting lainnya. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor perluasan makna akibat semakin luas penggunaannya, perkembangan teknologi informasi dan teknologi, maupun perubahan analogi.

Gerakan literasi sekolah merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang literat adalah sekolah yang menyenangkan dan ramah anak dimana semua warganya menunjukkan empati, kepedulian, semangat ingin tahu dan cinta pengetahuan, cakap berkomunikasi dan dapat berkontribusi kepada lingkungan sosialnya. Pelibatan publik adalah peran serta warga sekolah (guru, kepala sekolah, peserta didik, orangtua, tenaga kependidikan, pengawas sekolah dan komite sekolah) akademisi, dunia usaha dan industri dan pemangku kepentingan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendasmen Kemdikbud.

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) Tak Sebatas Baca Buku, Ini dia cara penerapnya melalui kurikulum wajib baca yang bersumber dari manual pendukung pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah. Sejak anak menginjak usia sekolah dasar anak dibantu untuk membaca dengan benar. Konsentrasi penuh saat membaca sangat diperlukan. Kadang sebagian orang tidak fokus ketika membaca buku, layaknya orang yang membaca berita dalam surat kabar. Literasi merupakan keterampilan penting dalam hidup. Sebagian besar proses pendidikan bergantung pada kemampuan dan kesadaran literasi. Budaya literasi yang tertanam dalam diri peserta didik memengaruhi tingkat keberhasilannya, baik di sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Hal yang paling mendasar dalam praktik literasi adalah kegiatan membaca. Keterampilan membaca merupakan pondasi untuk mempelajari berbagai hal lainnya. Kemampuan ini penting bagi pertumbuhan intelektual peserta didik. Melalui membaca peserta didik dapat menyerap pengetahuan dan mengeksplorasi dunia yang bermanfaat bagi kehidupannya.

Perlu diketahui bahwa literasi merupakan kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas. Kegiatan literasi selama ini identik dengan aktivitas membaca dan menulis, namun sesuai dengan Deklarasi Praha pada tahun 2003 menyebutkan bahwa literasi juga mencakup bagaimana orang lain berkomunikasi dengan masyarakat. Literasi bermakna praktek dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya UNESCO pada tahun 2003. Deklarasi UNESCO juga menyebutkan bahwa literasi informasi terkait pula dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, menciptakan, menggunakan, dan mengkomunikasikan informasi untuk mengatasi berbagai persoalan.

Gerakan Literasi Sekolah merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, Komite Sekolah, orang tua/ wali murid peserta didik), akademisi, penerbit, media massa, masyarakat (tokoh masyarakat yang dapat merepresentasikan keteladanan, dunia usaha, dan lain-lain.), dan pemangku kepentingan dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Gerakan Literasi Sekolah mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan Umum Gerakan Literasi Sekolah, yaitu menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam Gerakan Literasi Sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sedangkan tujuan khusus Gerakan Literasi Sekolah, yaitu 1) menumbuhkembangkan budaya literasi di sekolah, 2) meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat, 3) menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan, dan 4) menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca.

Urgensi GLS untuk Jenjang MI/SD

Urgensi GLS dapat dibedakan atas empat hal, yakni sebagai berikut:

1. Fakta, bahwa hasil survei internasional (PIRLS 2011, PISA 2009 & 2012) yang mengukur keterampilan membaca peserta didik, Indonesia menduduki peringkat bawah.
2. Tuntutan, keterampilan membaca pada abad 21 adalah kemampuan memahami informasi secara analitis, kritis dan reflektif.
3. Pembelajaran, di sekolah belum mampu mengajarkan kompetensi abad 21.
4. Kegiatan membaca di sekolah, perlu dikuatkan dengan pembiasaan membaca di keluarga dan masyarakat.

Tujuan dan Kegunaan GLS untuk Jenjang MI/SD

Tujuan GLS dibedakan atas dua bagian, yakni sebagai berikut:

1. Tujuan umum. Menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam Gerakan Literasi Sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat.
2. Tujuan khusus, terbagi atas:
 - a. Menumbuhkembangkan budaya literasi membaca dan menulis siswa di sekolah.
 - b. Meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat.
 - c. Menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan.

- d. Menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan menyediakan berbagai strategi membaca.

Ruang Lingkup GLS

Sejalan dengan berkembangnya tujuan pembelajar literasi, standar pembelajaran literasi pun mengalami perkembangan. Perkembangan standar pembelajaran literasi sebenarnya sejalan dengan perkembangan fokus dan paradigma pembelajaran literasi. Dengan kata lain, perubahan fokus, paradigma dan tujuan pembelajaran literasi berimplikasi pada perubahan standar pembelajaran literasi.

Fokus pembelajaran literasi pertama adalah fokus teks. Fokus ini menetapkan bahwa standar utama yang harus dicapai dalam pembelajaran literasi lebih ditekankan pada aspek linguistik dalam sebuah teks. Fokus pembelajaran literasi kedua adalah fokus berpikir. Fokus pembelajaran literasi yang ketiga adalah fokus kelompok. Fokus ini menetapkan sejumlah standar pembelajaran literasi. Fokus pembelajaran literasi keempat adalah fokus pertumbuhan. Fokus ini menetapkan sejumlah standar pembelajaran literasi yang berbeda dengan ketiga fokus yang lain.

Sejalan dengan hal tersebut, ruang lingkup gerakan literasi adalah sebagai berikut: 1) Lingkungan fisik sekolah (fasilitas dan sarana prasarana literasi). 2) Lingkungan sosial dan afektif (dukungan dan partisipasi aktif seluruh warga sekolah). 3) Lingkungan akademik (program literasi yang menumbuhkan minat baca dan menunjang kegiatan pembelajaran di SD).

Proses Implementasi GLS untuk Jenjang MI/SD

Langkah-langkah kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai

- a. Membacakan nyaring

Guru/pustakawan/kepala SD/relawan membacakan buku/bahan bacaan lain dengan nyaring.

- b. Membaca dalam hati

Membaca dalam hati (*sustained silent reading*) adalah kegiatan membaca 15 menit yang diberikan kepada peserta didik tanpa gangguan. Guru menciptakan suasana tenang, nyaman, agar peserta didik dapat berkonsentrasi pada buku yang dibacanya.

2. Menata sarana dan lingkungan kaya literasi

Sarana literasi mencakup perpustakaan sekolah, Sudut Baca Kelas dan area baca. Perpustakaan berfungsi sebagai pusat pembelajaran di SD. Pengembangan dan penataan perpustakaan menjadi bagian penting dari pelaksanaan gerakan literasi SD dan pengelolaan pengetahuan yang berbasis pada bacaan. Perpustakaan yang dikelola

dengan baik mampu meningkatkan minat baca warga SD dan menjadikan mereka pembelajar sepanjang hayat. Perpustakaan SD idealnya berperan dalam mengkoordinasi pengelolaan Sudut Baca Kelas, area baca dan prasarana literasi lain di SD. a) Perpustakaan SD, b) Sudut baca kelas, c) Area baca, d) UKS, kantin dan kebun sekolah

3. Menciptakan lingkungan kaya teks

Untuk menumbuhkan budaya literasi di lingkungan sekolah, ruang kelas perlu diperkaya dengan bahan-bahan kaya teks.

4. Memilih buku bacaan di SD

5. Pelibatan publik

Implikasi GLS untuk Jenjang MI/SD

Gerakan literasi di SD diharapkan akan menciptakan ekosistem SD yang literat. Ekosistem yang literat adalah lingkungan SD yang:

- a. Menyenangkan dan ramah peserta didik, sehingga menumbuhkan semangat warganya dalam belajar;
- b. Semua warganya menunjukkan empati, peduli dan menghargai sesama;
- c. Menumbuhkan semangat ingin tahu dan cinta pengetahuan;
- d. Memampukan warganya cakap berkomunikasi dan dapat berkontribusi kepada lingkungan sosialnya; dan
- e. Mengakomodasi partisipasi seluruh warga dan lingkungan eksternal SD.

Ekosistem SD yang diharapkan di setiap jenjang adalah menciptakan ekosistem SD yang literat, yaitu SD yang menanamkan dasar-dasar sikap dan perilaku empati sosial dan cinta kepada pengetahuan. Di era digital ini, kemampuan literasi perlu mempertimbangkan aspek ketersediaan media di lingkungan SD.

Literasi dikatakan kemelekwacanaan. Sementara wacana adalah suatu teks yang dikembangkan di tiap sekolah. Apalagi dalam kurikulum 2006 (KTSP) khususnya untuk mata pelajaran bahasa Inggris adalah *based on to genre* (berdasarkan wacana). Siswa mempelajari sebuah wacana baik teks yang berbentuk deskriptif, naratif, recount, prosedur ataupun report sesuai dengan apa yang harus diajarkan di tingkat SMP itu seorang siswa bisa mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis suatu teks secara suatu kesatuan yang utuh. Karena itulah, jika literasi diterapkan secara utuh, niscaya kemampuan berbahasa seseorang pastilah akan meningkat, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga secara lambat maupun cepat.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan pendidikan adalah segala hal yang berkaitan dengan keputusan untuk memecahkan masalah pendidikan.
2. Ada enam tipe kebijakan pendidikan, yakni: model deskriptif, model normatif, model verbal, model simbolis, model prosedural dan model sebagai pengganti dan persepektif.
3. Proses kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut: perumusan masalah, interpretasi, identifikasi alternatif, evaluasi, pemilihan alternatif, interpretasi, implementasi dan evaluasi.
4. Gerakan literasi sekolah adalah upaya meningkatkan kemampuan baca, sains, matematis peserta didik.
5. Urgensi GLS dibedakan empat hal, yakni: fakta, tuntutan, pembelajaran dan kegiatan membaca di sekolah.
6. Tujuan GLS adalah menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam Gerakan Literasi Sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat.
7. Ruang lingkup GLS, yakni: lingkungan fisik sekolah, lingkungan sosial dan afektif serta lingkungan akademik.
8. Implementasi GLS di MI/SD adalah dengan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menata sarana dan lingkungan kaya literasi, menciptakan lingkungan kaya teks, memilih buku bacaan di SD dan melibatkan publik.
9. Bahwa kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
10. Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Y. Dkk. 2017. *Pembelajaran Literasi: Strategi Meningkatkan Kemampuan Literasi Matematika, Sains, Membaca dan Menulis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bakry, A. 2010. *Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Jurnal Medtek.
- Diantoro, F. _____. *Studi Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Proses Kebijakan Pendidikan*.
- Dikdas. _____. *Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar*. Jakarta: Dikdasmen Kemdikbud.
- Dispenprov Jabar. _____. "Gerakan Literasi Sekolah". Artikel.
- Dunn William. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dirjen Dikdasmen. 2016. *Panduan Gerakan Literasi di Sekolah Menengah Atas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Imron , Ali. 1995. *Kebijakan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Purnama, S. 2010. *Penelitian Kebijakan Pendidikan: Education Policy Research*. Makalah disampaikan dalam diskusi kelas Program Doktor Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang.
- Satgas GLS. _____. *Buku Saku Gerakan Literasi Sekolah: Menumbuhkan Budaya Literasi di Sekolah*. Jakarta: Kemdikbud.
- Sa'ud, US. _____. *Pengembangan Kebijakan Pendidikan dalam Kerangka Otonomi Daerah*.
- Violeletta, A. *Kebijakan Pendidikan*. Online:
http://aybahriani.blogspot.co.id/2015/06/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_88.html. Diakses pada 02 November 2017.